

BAB I

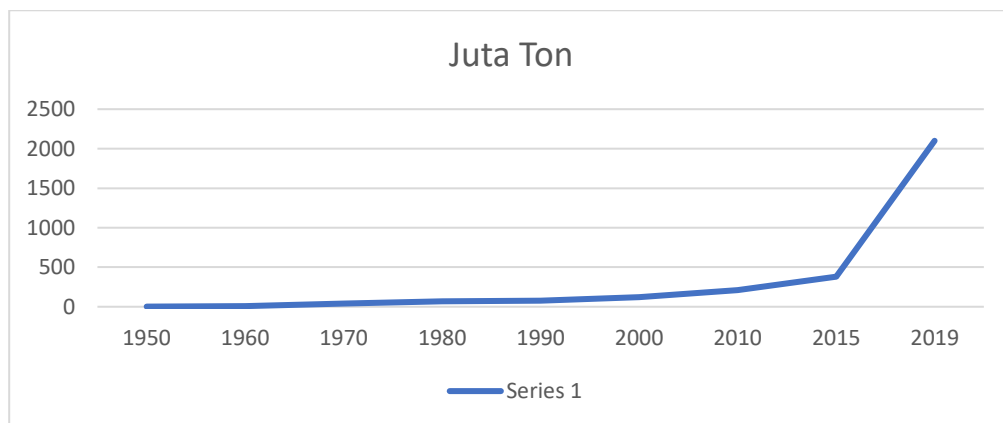
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Perkembangan kehidupan manusia dan tumbuhnya populasi manusia itu sendiri membawa dampak pada peningkatan sampah karena manusia menghasilkan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi sampah yang tidak dapat dikelola dengan bijak, dalam jumlah yang besar akan mengganggu kesehatan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan, kini menjadi acuan bagi suatu negara untuk merumuskan pembangunannya. Permasalahan pengelolaan sampah yang tidak efektif, akan menyebabkan lingkungan menjadi bermasalah. Peningkatan populasi manusia juga berpengaruh terhadap naiknya produksi sampah. Kenaikan tersebut diakibatkan oleh kebiasaan manusia yang selalu menimbulkan sisa, seperti sisa makanan, sisa bungkus makanan, dan sisa limbah yang menyebabkan meningkatnya produksi sampah. Komunitas negara-negara di dunia yang terhimpun dalam perserikatan bangsa-bangsa, telah menyepakati secara bersama-sama mengenai visi pembangunan dunia yang terangkum dalam 17 arah prioritas pembangunan dunia dalam *sustainable development goals* (SDGs). Tujuh belas indikator pembangunan dunia salah satunya mengisyaratkan mengenai akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Akses sanitasi di dalamnya eksplisit menerangkan perihal pengelolaan sampah. Tujuan SDGs merupakan paket pembangunan berkelanjutan hingga pada tahun 2030 mendatang. Produksi sampah di dunia setiap tahun terus

mengalami peningkatan sehingga tidak heran jika dunia Internasional telah memberikan peringatan kepada negara-negara di dunia untuk dapat mengambil kebijakan dalam mengantisipasi produksi sampah yang semakin besar. Pengelolaan sampah negara-negara di dunia berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tetapi visi dunia tetaplah satu, yaitu mencegah dunia dari darurat sampah serta mengelola sampah dengan cara yang tepat dan benar. Berikut adalah data produksi sampah dunia

Gambar 1.1
Produksi Sampah Dunia

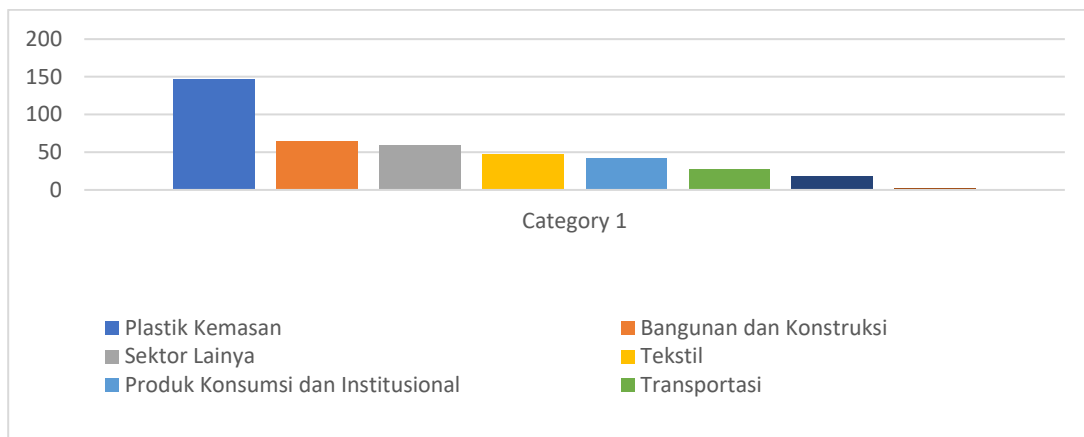


Sumber : Kompas (2018) , (Verisk Maplecroft 2019)

Gambar 1.1 menunjukkan produksi sampah di dunia sejak 1950 hingga 2019. Berdasarkan data dari ScienceMag sebagaimana dikutip oleh Kompas (2018) produksi sampah dunia terhitung sejak 1950 sampai dengan 2015 cenderung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1950, jumlah produksi sampah masih pada kisaran 2 juta ton, sementara 65 tahun setelah itu, pada tahun 2015 produksi sampah dunia mencapai 381 juta ton pertahun atau meningkat 190

kali lipat dengan rata rata peningkatan sebesar 5,8 ton pertahunnya. Riset dari Verisk Maplecroft (2019) menunjukkan peningkatan produksi sampah yang sangat drastis di tahun 2019 yang mencapai 2,1 miliar ton sampah. Kondisi ini diperparah karena, hanya 16 % atau 323 juta ton yang dapat didaur ulang, sedangkan 84 % lainnya atau setara 950 juta ton sampah tiap tahun tidak berkelanjutan/dibuang (Verisk Macplecroft : 2019). Peningkatan Grafik di atas sekaligus memberikan gambaran permasalahan sampah sudah harus menjadi perhatian bersama, mengingat begitu besarnya jumlah produksi sampah setiap tahun, yang diprediksi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, seiring meningkatnya populasi dunia. Sampah yang tidak dikelola dengan benar dikhawatirkan akan mengganggu pencemaran lingkungan di masa depan. Sampah yang dihasilkan atau diproduksi terdiri dari berbagai jenis, sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini

Gambar 1.2
Produksi Sampah Dunia berdasarkan Jenis (Juta Ton) Tahun 2018



Sumber : Kompas 2018

Pada gambar 1.2, jumlah produksi sampah terbesar berasal dari sektor plastik kemasan produk yang mencapai 146 juta ton pertahun, disusul sampah bidang pembangunan dan konstruksi sebesar 65 juta ton. Jenis sampah lain, yaitu tekstil, produk konsumsi dan institusional, transportasi, elektronik, dan mesin industri, sedangkan sektor plastik merupakan limbah yang tidak dapat membusuk selama bertahun tahun dan tidak dapat diuraikan oleh tanah (Nugroho et al., 2018).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar juga mengalami peningkatan produksi sampah. Indonesia berada di peringkat kedua dunia pembuang sampah plastik ke laut dengan laju 0,52 kg sampah/orang/hari atau setara 3,22 MMT/tahun (Septiani et al., 2019). Prestasi yang buruk tersebut menambah catatan *minor* pengelolaan sampah di Indonesia. Dewasa ini, sampah menjadi salah satu permasalahan yang kritis dan memerlukan penanganan yang serius dan segera. Sampah plastik menjadi yang paling mengherankan. Studi

dengan judul *plastic waste associated with disease on coral reefs* menunjukkan bahwa, sampah plastik paling banyak ditemukan di Indonesia, yakni 25,6 bagian per 100m² terumbu karang di lautan (Lamb et al., 2018). Pada tahun 2019, Indonesia ditaksir menghasilkan hingga 66-67 juta ton sampah atau setara dengan 175.000 ton sampah atau dengan kata lain dapat disamakan satu orang menghasilkan sampah sebesar 0,7 kg per hari (KLHK 2019). Peningkatan sampah di Indonesia mencapai 38 juta/tahun dan 30 % sampahnya merupakan jenis plastik (Septiani et al., 2019). Berikut adalah data produksi sampah di Indonesia

Tabel 1.1
Data Produksi Sampah Indonesia

Tahun	Jumlah (Juta Ton) dalam setahun	Persen kenaikan
2015	64	0
2016	65	1,5 %
2017	65,5	0,7 %
2018	66,5	1,5 %
2019	68	2,2 %

Sumber : Tirto.id 2019

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah produksi sampah di Indonesia setiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 jumlah produksi sampah di Indonesia mencapai 64 juta ton dalam setahun, naik 1,5 % atau satu juta ton pada tahun berikutnya menjadi 65 juta ton. Pada tahun 2017, jumlah volume sampah di Indonesia kembali meningkat sebanyak 65,5 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 0,7 % dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 volume sampah menjadi 66,5 juta ton atau naik sebanyak 1,5 % dan pada tahun 2019, data menunjukkan

jumlah sampah di Indonesia telah mencapai 68 juta ton. Produksi sampah yang terus meningkat setiap tahunnya, apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan timbulan sampah yang menggunung dan berbahaya bagi lingkungan. Timbulan sampah menjadi parameter produksi sampah dalam suatu daerah. Persebaran timbulan sampah berdasarkan Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 1.3
Timbulan Sampah Per Provinsi di Indonesia

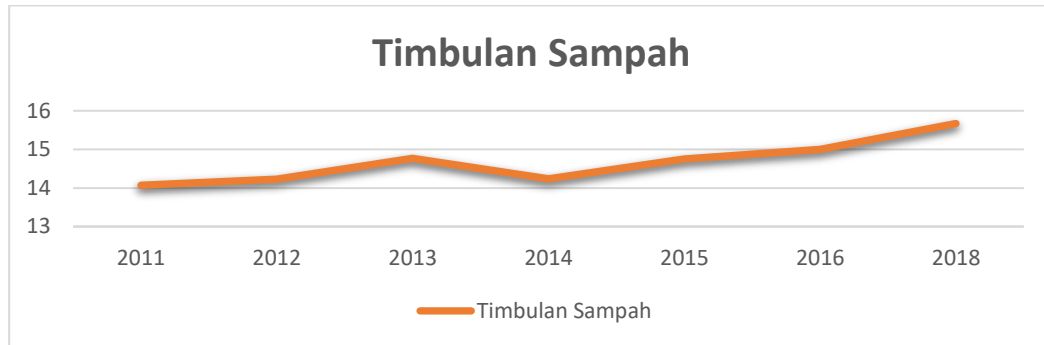


Sumber : Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Gambar 1.3 menunjukkan jumlah timbulan sampah yang tersebar di tiap Provinsi di Indonesia. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menemukan bahwa Jawa Tengah menjadi salah satu dari 10 besar Provinsi dengan jumlah timbulan sampah terbanyak di Indonesia. 10 besar Provinsi yang memiliki timbulan sampah terbanyak adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa

Tengah, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Riau, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat (Kementrian PUPR). Jawa tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang banyak sehingga tidak heran jika jumlah produksi sampah juga banyak. Banyaknya timbulan sampah juga diakibatkan oleh tingkat konsumsi masyarakat yang masih sangat tinggi khususnya terhadap penggunaan kemasan plastik. Penelitian Purwoko (2012) (dalam Septiani et al., 2019) merekomendasikan agar Pemerintah mengenakan cukai bertarif tinggi pada kantong plastik guna menurunkan permintaan kantong plastik tanpa mengurangi produk domestik bruto. Penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa pola konsumsi khususnya penggunaan plastik masih sangat tinggi dilakukan oleh masyarakat kita. Data produksi sampah di Provinsi Jawa Tengah setiap tahun juga mengalami peningkatan. Berikut data produksi timbulan sampah Jawa Tengah dihitung rata-rata setiap harinya.

Gambar 1.4
Produksi Rata-Rata Sampah Perhari Provinsi Jawa Tengah (Dalam Ribuan Ton)



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

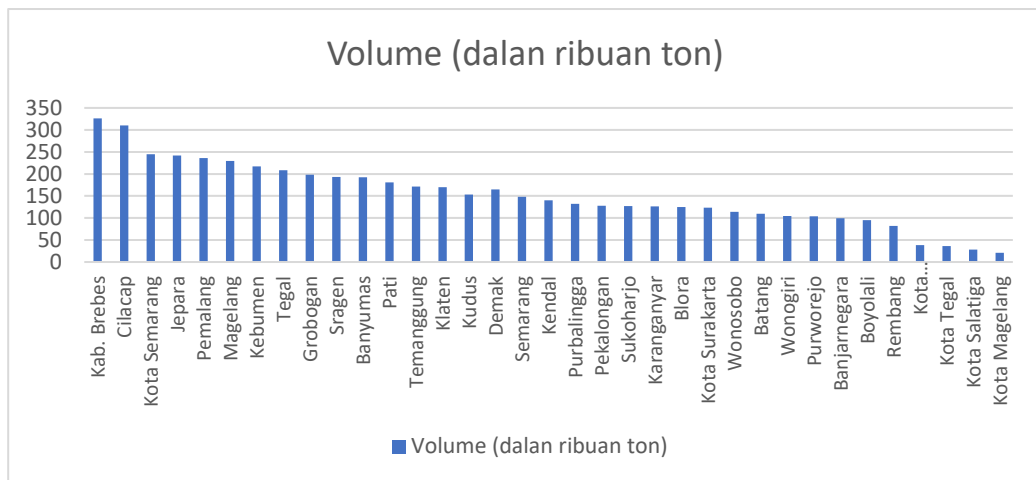
Pada gambar 1.4, dapat disimpulkan bahwa produksi sampah di Jawa Tengah setiap tahun mengalami fluktuasi yang cenderung mengarah kepada peningkatan. Grafik di atas menunjukkan *trend* kenaikan produksi sampah rata-rata dalam sehari yang dihasilkan oleh Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2011, jumlah produksi sampah dalam sehari adalah 14.007 ton dan meningkat menjadi 14.230 ton pada tahun 2012. Setahun berikutnya, produksi sampah kembali naik menjadi 14.770 ton perhari, walaupun sempat turun menjadi 14.240 ton, namun kembali naik pada 2 tahun berikutnya. Pada tahun 2018, jumlah produksi sampah di Jawa tengah mencapai 15.671 ton per hari sehingga dikalkulasi jumlah produksi sampah Jawa Tengah dalam setahun mencapai 5.719.915 ton dengan persentase 40 % plastik serta hanya 5 % yang didaur ulang (Medcom.id ,2019).

Setiap tahun, Jawa Tengah terus mengalami peningkatan produksi sampah sehingga apabila pengelolaan sampah tidak efektif dikhawatirkan dapat menyebabkan permasalahan kesehatan, lingkungan, dan masalah sosial lainnya. Timbulan sampah khususnya sampah plastik, memuat material yang mengancam

kelangsungan hidup makhluk hidup karena terbuat dari bahan kimia yang tidak dapat terdegradasi oleh mikroba di lingkungan. Proses pembakaran sampah yang biasa dikenal oleh masyarakat pedesaan, juga dapat menimbulkan CO₂ dan CO yang berbahaya (Zusfahair et al., 2007)

Jumlah timbulan sampah di Provinsi Jawa Tengah dapat dirinci tiap Kabupaten/Kota. Sebagaimana diketahui, Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 Kabupaten dan Kota yang masing masing memiliki volume sampah rata rata per hari sebagai berikut :

Gambar 1.5
Volume Sampah Rata-Rata Per Hari Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Pada tahun 2017, Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten dengan tingkat volume sampah terbesar ke 11 dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan jumlah produksi volume sampah perhari mencapai 192 793 m³. Rata rata

volume sampah yang terangkut perhari sebesar 22,72 % atau masih di bawah rata-rata keterangkutan sampah perhari Provinsi Jawa tengah yang mencapai 26,94%. Jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 sebesar 1.679.124 jiwa dan merupakan 4 besar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk terbanyak (jateng.bps.go.id 11/09/19). Jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan mencapai 0,85 % per tahun akan mempengaruhi jumlah produksi sampah di Kabupaten Banyumas. Faktor lain pemilihan Kabupaten Banyumas sebagai lokus penelitian karena Kabupaten ini telah berhasil meraih predikat sebagai kota adipura sejak 2014-2019, tetapi masih mengalami permasalahan dalam pengelolaan sampah (radarbanyumas.co.id 9/1/2020). Produksi volume sampah di Kabupaten Banyumas terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2005 lalu, produksi sampah di Banyumas mencapai 700 m³ dan meningkat menjadi 1100 m³ pada tahun 2010 (Widiyanto et al., 2017). Produksi sampah pada tahun 2017 mengindikasikan dalam 7 tahun, produksi sampah di Banyumas telah meningkat sebesar 190 000 m³. Kondisi tersebut diperparah dengan keadaan TPA Gunung Tugel yang sudah melebihi kapasitas yang ditentukan sehingga hanya 10,85 % volume sampah yang terangkut dan 89,15 % sampah masih belum ada penanganan yang semestinya dan berpotensi mengakibatkan pencemaran (Widiyanto et al., 2017). Jumlah timbulan sampah Kabupaten Banyumas dapat dilihat dalam tabel 1.2

Tabel 1.2
Volume Timbulan Sampah Banyumas Per hari

Tahun	Timbulan (Ton)	Volume keterangkutan
2017	400	22,72 %
2018	481	41,58 %
2019	600	45 %

Sumber : Sipsn.menlhk.go.id

Tabel 1.2 menunjukkan volume keterangkutan sampah per hari di Kabupaten Banyumas. Volume keterangkutan sampah di Banyumas meningkat dari 22,72 % menjadi 45 %, tetapi belum memenuhi target keterangkutan sampah sesuai dengan dokumen penyelenggaraan sistem sanitasi kabupaten (SSK Banyumas) 2016-2020. Dokumen tersebut memuat penjabaran target pengelolaan keterangkutan sampah mencapai 60 % pada tahun 2020, 25 % pengelolaan dari sumbernya, dan 15 % dikelola dalam 3 R. Realitas yang ada saat ini, pencapaian tersebut belum terlaksana sesuai rencana awal. Regulasi mengenai pengelolaan sampah diatur dalam UU NO 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Regulasi turunan pengelolaan sampah di Banyumas terdapat dalam perda No 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, yang juga dalam implementasinya secara spesifik terdapat dalam dokumen sistem sanitasi kabupaten (SSK) Banyumas 2016-2020.

Jumlah sampah yang dihasilkan Kabupaten Banyumas setiap harinya kian mengkhawatirkan, tercatat sampah mencapai 600 ton perhari dengan asumsi 0,3 kg per orang menghasilkan sampah dalam sehari, yang lebih mengkhawatirkan adalah hanya 45% sampah yang diangkut ke TPA, 15% ke pengepul atau industri daur

ulang, 5 % menjadi kompos, dan 35 % lainnya atau sekitar 200 ton tidak dikelola (DLH 2019). Berangkat dari hal itu, kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas kini berubah sesuai surat edaran Bupati No. 660.1/7776/2018 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas, terjadi perubahan pengelolaan sampah yang sebelumnya berbasis pelayanan pemerintah daerah dengan pola kumpul, angkut, dan buang ke TPA menjadi pengelolaan sampah dilakukan dari sumbernya berbasis masyarakat dengan pola pilah sampah, manfaatkan, dan musnahkan sisanya.

Tujuan pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Berdasar sudut pandang kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dipandang baik jika sampah tersebut tidak menjadi media berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi medium perantara menyebar luasnya suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus dipenuhi, yaitu tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau (tidak mengganggu nilai estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan yang lainnya. Pada prinsipnya sampah harus dikelola karena adanya sampah dapat mengancam keberlanjutan keberadaan, kehidupan, dan kesejahteraan manusia. Regulasi pengelolaan sampah sesuai surat edaran justru menimbulkan permasalahan baru. Masyarakat tidak melakukan pemilahan sampah, masyarakat tidak mengetahui pola baru, kelompok swadaya masyarakat tidak diikutsertakan, kebijakan terkesan mendadak dan tanpa sosialisasi menyeluruh sehingga yang

terjadi di lapangan adalah penumpukan sampah di berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas akibat tidak diolah juga tidak diangkut (Andarwati et al., 2018)

Permasalahan lain adalah berdasarkan data dalam dokumen SSK Kabupaten Banyumas 2016-2020, terdapat skoring desa-desa di Kabupaten Banyumas dengan area beresiko sampah. Hasilnya adalah, 51 desa di Kabupaten Banyumas merupakan area beresiko tinggi dan 24 desa beresiko sangat tinggi sehingga dapat dilihat bahwa jumlah desa yang masih beresiko tinggi dalam permasalahan sampah berjumlah 75 desa atau mencapai 75,7 % (SSK Banyumas 2016-2020). Kondisi lain mengenai permasalahan sarana dan prasarana yang belum mencukupi. Berikut adalah kondisi sarana dan prasana dalam pengeleolaan sampah yang dimiliki oleh Kabupaten Banyumas.

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas

No	Nama	Unit Persampahan	UKP Purwokerto	UKP Banyumas	UKP Ajibarang	Jumlah
1	Dump truck	-	16	4	4	24
2	Truck Amr roll	-	7	1		8
3	Pick up	-	2	1	1	4
4	Motor roda 3	-	1	2	3	6
5	Excavator	1	-	-	-	1
6	Buldozer	2	-	-	-	2
7	Gerobak sampah	-	95	36	26	308
8	TPS	-	58	3	4	65
9	TPA	3	-	-	-	3

Sumber : SSK Banyumas 2016-2020

Berdasarkan tabel 1.3, dari segi sarana dan prasana yang dimiliki untuk menanganani sampah di Kabupaten Banyumas masih kurang. TPS belum merata dan jumlahnya masih sedikit, juga kondisi TPA yang hanya memiliki 3 tempat.

Kabupaten Banyumas dipilih sebagai lokus penelitian karena permasalahan sampah masih menjadi isu publik yang masih belum terselesaikan dengan efektif.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Banyumas adalah volume sampah yang berserakan di penampungan pemukiman menyebabkan bau, pengangkutan sampah yang mengganggu transportasi, tempat penampungan sampah yang tidak sesuai dengan volume sampah, sampah yang dipisahkan warga tidak bermanfaat, kebiasaan warga membuang sampah di sungai, tidak memiliki informasi tentang teknologi sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat belum optimal, belum maksimalnya dukungan masyarakat dan pemerintah, dan kelompok masyarakat yang belum mengetahui pemanfaatan sampah (Widiyanto et al., 2017)

Masyarakat di Kabupaten Banyumas kebanyakan tidak memiliki lahan untuk pengelolaan sampah sekaligus kurang sadar terhadap pembuangan sampah (Rahajuni, 2018). Permasalahan sampah di Kabupaten Banyumas yang mencapai 35% tidak bisa dikelola, salah satunya diakibatkan oleh jumlah TPA yang tidak memadai, serta pengelolaan sampah terpadu yang belum berjalan optimal (Widiyanto et al., 2017). (Andarwati et al., 2018) menemukan jika partisipasi ASN dan dinas di Kabupaten Banyumas untuk mengumpulkan sampah melalui bank sampah hanya mencapai 21,4%, Penelitian lain menemukan bahwa TPA Gunung Tugel sebagai salah satu pembuangan sampah sudah melebihi kapasitas dan umur TPA yang semakin berkurang (Suyanto et al., 2015). Siti Deli, dkk. (2019)

menemukan permasalahan pengelolaan sampah belum menemukan pola yang efektif. Penelitian tersebut juga menemukan adanya pengaruh peran kepemimpinan di dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini penting dilakukan. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah bagaimana rekomendasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas?

1.2 Identifikasi Masalah

1. Perubahan kebijakan pengelolaan sampah tidak dibarengi pendampingan yang konkrit.
2. Pandangan masyarakat tentang pengelolaan sampah yang hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah.
3. Tidak tercapainya target pengelolaan sampah menurut SSK Kabupaten.
4. Jumlah TPA sedikit dan sudah melewati batas guna dengan timbulan yang sangat besar.
5. Masyarakat kurang sadar dalam pengelolaan sampah.
6. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah masih kurang.
7. Masyarakat tidak memiliki lahan pembuangan sampah.
8. Partisipasi ASN sebagai *pilot project* pengelolaan sampah belum optimal.

1.3 Perumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2015:228) perumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1.3.1 Bagaimana Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas?

1.3.2 Bagaimana Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Untuk Menganalisis Proses Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas

1.4.2 Untuk Memberikan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat memberikan kemanfaatan sebagai berikut:

a. Secara Teoritik

Secara teoritik penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman penelitian dalam pengembangan ilmu administrasi publik khususnya dalam teori-teori kebijakan publik dan analisis kebijakan publik, serta terdapat keterbukaan publik khususnya mahasiswa maupun pemangku kebijakan di Kabupaten Banyumas.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan para stakeholders pembuat kebijakan (Pemda Kabupaten Banyumas) yang berperan dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten Banyumas. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi dan informasi kepada mahasiswa maupun orang yang hendak melakukan penelitian serta menjadi pertimbangan bagi pemerintah kabupaten Banyumas untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, judul jurnal, Teori	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
1	Paulus Tumanggor dan Slamet Santoso.2019. Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal.	Kualitatif Teori Riant Nugroho untuk menentukan ketepatan implementasi : 1). Tepat Kebijakan 2). Tepat pelaksana 3). Tepat target 4).Tepat lingkungan 5). Tepat proses. Teori Bridman dan Davis untuk merumuskan alternatif, 1). Formulasi masalah kebijakan 2). Merumuskan tujuan dan sasaran 3). Mengidentifikasi parameter kebijakan 4). Mencari alternatif kebijakan 5). Memutuskan alternatif. Untuk menentukan parameter menggunakan teori Patton dan Sawicky dengan 1). Kelayakan teknis 2). Kemampuan ekonomi dan finansial 3). Kelayakan politik 4). Kelayakan adminsitratif	Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal belum tepat secara kebijakan karena tujuan lingkungan bersih tidak tercapai. Kemudian tepat pelaksana yang melaksanakan hanyalah dinas lingkungan hidup. Tidak tepat target, karena 50 % pengurangan sampah tidak tercapai sesuai target. Tepat lingkungan hanya berjalan pada persepsi petugas. Pola pengelolaan,kumpul, buang angkut. Alternatif yang dipilih untuk kebijakan pengelolaan sampah adalah menambah anggaran alokasi pengelolaan sampah.
2	Agnes Fitria Widiyanto,dkk. 2017. Model Pengelolaan	Kualitatif Model pengelolaan sampah berbasis <i>stakeholders</i> Model ini terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian	Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Banyumas adalah volume sampah yang berserakan di penampungan pemukiman menyebabkan bau, pengangkutan sampah yang mengganggu transportasi,

	Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Banyumas.	data, dan penarikan kesimpulan (<i>Milles dan Huberman 1992</i>)	tempat penampungan sampah yang tidak sesuai dengan volume sampah, sampah yang dipisahkan warga tidak bermanfaat, kebiasaan warga membuang sampah di sungai, tidak memiliki informasi tentang teknologi sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat belum optimal, belum maksimalnya dukungan masyarakat dan pemerintah, dan kelompok masyarakat yang belum mengetahui pemanfaatan sampah.
3	DijanRahajuni,dkk. 2018. Danpak Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) pada Masyarakat di Kabupaten Banyumas.	Kualitatif Penelitian menggunakan pendekatan <i>focus grup discussion</i> untuk mengetahui dimensi implementasi program kotaku yang meliputi Bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, dan ruang terbuka publik.	Masyarakat di Kabupaten Banyumas kebanyakan tidak memiliki lahan untuk pengelolaan sampah sekaligus kurang sadar terhadap pembuangan sampah. Program Kotaku belum berjalan optimal meskipun telah berdampak pada pengurangan lingkungan kumuh dan mendidik generasi muda untuk cinta lingkungan.
4	Ika Yuli,dkk.2017. Studi Pengelolaan Bank Sampah pada Kantor Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten	Metode deskriptif analitik Teori dengan melihat implementasi kebijakan Bank sampah dengan indikator input, proses, output	Partisipasi ASN dan dinas di Kabupaten Banyumas untuk mengumpulkan sampah melalui bank sampah hanya mencapai 21,4%, artinya masih banyak ASN dan dinas yang tidak melakukan pengumpulan sampah sebanyak 1 kg perbulan sesuai surat edaran bupati Banyumas No. 660/7376/2016.

	Banyumas Tahun 2017.		
5	(Suyanto et al., 2015) Model Kebijakan Pengelolaan Sampah berbasis Partisipasi “ <i>green community</i> ” Pendukung Kota Hijau.	Model kualitatif Teori untuk menentukan model kebijakan pengelolaan sampah menggunakan teori analisis hierarki proses (AHP)	Permasalahan sampah di Kabupaten banyumas adalah TPA Gunung Tugel sebagai salah satu pembuangan sampah sudah melebihi kapasitas dan umur TPA yang semakin berkurang. Model kebijakan yang diusulkan menggunakan teori AHP adalah partisipasi <i>green community</i> , pola 3 R, penegakan hukum, dan pemilahan sampah rumah tangga.
6	Diana Hertati.2017. Kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai solusi alternatif <i>green city</i> di Kota Surabaya.	Kualitatif Teori Riant Nugroho untuk melihat keberhasilan implementasi melalui dua hal: 1). Keberhasilan dari proses 2). Keberhasilan dari dampak di masyarakat Teori Milwan untuk melihat isi kebijakan yaitu kepentingan yang terpenuhi, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, para pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan.	Model kebijakan bank sampah sangat efektif diterapkan untuk menghasilkan pengelolaan sampah yang optimal serta menambah dana bagi si pemilik yang dapat dilakukan secara individual maupun kolektif.
7	Ogi Tri Utomo dan Nur Hilal,2016. Tinjauan Pengelolaan Sampah di Objek	Kualitatif Teori pengelolaan sampah yang meliputi aspek :	Pengelolaan sampah pada tempat wisata tersebut tidak dilakukan secara khusus, tetapi nilai kategori cenderung baik dalam pengelolaannya mulai dari fase penimbunan hingga pemanfaatan, tetapi pengelolaan sampah yang mendapat nilai tidak baik hanya pada fase pembuangan

	Wisata <i>Dream Land Park</i> Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2016.	Penimbunan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemanfaatan, dan tahap pembuangan akhir	akhir karena banyaknya lalat, tikus, dan hewan lainnya, petugas tidak menggunakan APD, tidak menggunakan alat atau seragam khusus, dan TPA jauh dari lokasi.
8	(Haryadi, 2018). Pemberdayaan Tim Penggerak PKK melalui Pembentukan Bank Sampah di Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas	Metode kualitatif dengan melihat peran tim penggerak PKK dalam mewujudkan bank sampah sebagai solusi permasalahan lingkungan	Desa Susukan merupakan desa yang memiliki potensi pariwisata yang besar, namun dalam kenyataannya memiliki permasalahan dalam pengelolaan sampah yang masih buruk. Lingkungan yang kotor dan tidak terawat. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan bank sampah untuk memperbaiki pengelolaan sampah dengan melakukan pemberdayaan tim penggerak PKK dengan dua tahap, yaitu persiapan dan pelaksanaan. Tahapan persiapan meliputi koordinasi dengan stakeholders, persiapan bahan, alat, dan administrasi. Serta tahap pelaksanaan meliputi workshop bank sampah, pembentukan organisasi, pemberian bantuan sarana prasarana, pelatihan, dan implementasi kegiatan. Kendala yang dihadapi adalah permasalahan waktu sosialisasi dan anggaran yang diperlukan.
9	Agnes Fitria,dkk. 2019. <i>Knowledge and Practice in Household Waste Management</i>	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap praktik pengelolaan sampah rumah tangga setelah dilakukan intervensi berupa sosialisasi, dan kegiatan lain yang memungkinkan perubahan mind shet dari setiap individu terhadap pola pengelolaan sampah rumah tangga yang baik.
10	Sugeng Wiyono,dkk. 2019.	Metode kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan pada sampel dan populasi yang menjadi obyek. Meskipun kondisi asupan

	<i>The Role Sanitation to Stunting Children age 6-35 months, Purwojati Subdistrict, Banyumas District, Central Java, Indonesia.</i>		makanan, naik protein, karbohidrat mencukupi lebih dari 80 persen, tetapi kondisi pengelolaan sampah rumah tangga buruk mencapai 92 %, sanitasi buruk mencapai 62 persen mempengaruhi dan riskan terjadinya efek stunting terhadap anak.
11	Rahab dan Agnes Fitria,2017. <i>Community Participation in Bank of Garbage : Explorative Case Study in Banyumas Regency</i>	Penelitian eksploratif deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Perkembangan bank sampah yang ada pada masyarakat tidak stabil, meskipun ada indikasi keberadaan bank sampah aktif dimasyarakat dan dipengaruhi masyarakat lain. Perkembangan yang tidak stabil perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak supaya bank sampah terus maju dan berkembang. Pengetahuan masyarakat tentang bank sampah meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, peran masyarakat, harga atau nilai ekonomi sampah, dan kegiatan daur ulang. Faktor yang mendorong adalah motivasi dan perilaku sadar lingkungan. Faktor penghambatnya adalah kurangnya dukungan, dan ketersediaan sarana prasarana.
12	Siti Deli Farhani,dkk. 2019. <i>The Determinant of Trash Management at Faculty of Health Science in a University in Banyumas</i>	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif	Hasil penelitian menemukan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil pengelolaan sampah dalam peran pemimpin, peran petugas pembersihan, pasrtisipasi masyarakat kampus, kondisi tempat sampah, kecukupan fasilitas, teknik operasional yang digunakan, dan biaya yang dikeluarkan. Faktor yang menjadi masalah dan berpengaruh paling besar adalah kecukupan sarana dan partisipasi masyarakat kampus.

	<i>Regency. Teori Pfammater (1996)</i>		
13	Muharnis Supriyani dan Dewi Susana 2016. <i>The Effectiveness of Organic Waste Treatment Training to the Knowledge, Attitude and Skill Enhancement of Family Welfare Programme Group in North Purwokerto Health Center Working Area</i>	Penelitian menggunakan eksperimen semu dengan pre test non acak.	Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan sikap, perilaku, dan ketrampilan sebelum dan sesudah pelatihan (metode Wilcoxon). Metode pre test menunjukkan perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah pelatihan, sedangkan metode <i>Whitney</i> tidak menunjukkan perbedaan dalam pengetahuan, sikap, dan ketrampilan setelah pelatihan

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik pada dasarnya telah ada sejak dulu, yang timbul pada masyarakat yang terorganisasi. Catatan sejarah peradaban manusia, di Asia Selatan termasuk Indonesia, Cina, dan Mesir kuno dahulu sudah didapatkan suatu sistem penataan pemerintahan. Sistem penataan tersebut pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi publik (Toha, 2008: 88). Sistem penataan pemerintahan di Indonesia pada saat itu terbentuk dari sistem kerajaan yang memang dulu begitu banyak berkembang di Indonesia.

Pfiffner dan Prestus (dalam Syafiie, 2010:23) mendefinisikan administrasi publik sebagai berikut :

- (1) Administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan pemerintah.
- (2) Administrasi publik dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.

Pfiffner mendefinisikan bahwa administrasi publik tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang diimplementasikan melalui badan badan pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Sejalan dengan pandangan Edward Litchfield (dalam Syafiie, 2010:25) yang mendefinisikan administrasi publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisasikan, dilengkapi dengan tenaga tenaganya, dibiayai, digerakan, dan dipimpin.

Administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan –kebijaksanaan pemerintah , pengarahan kecakapan, dan teknik teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang (Syafiie, 2010: 24).

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano (1988:29-30) adalah proses sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Chandler dan Plano menekankan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses untuk mengatur keputusan keputusan dalam kebijakan publik dan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan urusan publik untuk memecahkan masalah-masalah publik. Berdasarkan pendapat ahli di atas, administrasi publik adalah ilmu dan seni yang digunakan dalam menyelesaikan urusan publik dan dilaksanakan oleh badan badan pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dalam rangka mencapai tujuan negara.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah corak berpikir seseorang atau sekelompok orang karena ilmu pengetahuan bersifat nisbi, walaupun salah satu persyaratan harus dapat diterima secara universal, namun dalam kurun waktu tertentu tetap memiliki

perubahan, termasuk ilmu ilmu eksakta sekalipun (Syafiie, 2010:26). Hanya saja, ilmu ilmu eksakta memang cenderung objek-objek, fakta-fakta, dan hukum hukumnya relatif lebih lama untuk tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi serta pengindraan manusia, relatif lebih pasti dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial. Ilmu pengetahuan memang sangat terbatas kawasan kompetensinya, keterbatasan pertama adalah bahwa yang disebut kebenaran ilmiah itu bersifat abstrak, tetapi mutlak sangat diperlukan dalam kehidupan. Untuk itulah, di dalam revolusi ilmu pengetahuan diperlukan paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu (Thomas Kuhn (dalam Syafiie, 2010 : 26). Administrasi publik sebagai suatu disiplin ilmu telah mengalami perkembangan paradigma yang semakin menunjukan disiplin ilmu tersebut sangat berkembang.

Nicholas Henry (dalam Keban, 2004) mengemukakan 5 paradigma di dalam disiplin ilmu administrasi publik, yaitu sebagai berikut :

a. Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Pemerintah mempunyai dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik memusatkan perhatian pada pembuatan kebijakan atau ekspresi kehendak rakyat, sedangkan fungsi administrasi memberikan perhatian kepada pelaksanaan/ implementasi dari kebijakan atau kehendak rakyat tersebut. Implikasi dari paradigma tersebut adalah bahwa administrasi publik harus dilihat sebagai sesuatu yang bebas nilai agar tidak

memihak dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari government birokrasi. Paradigma ini hanya menekankan lokusnya saja, yaitu birokrasi pemerintahan tetapi fokus atau metode apa yang digunakan kurang dibahas dan diperinci.

b. Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma ini memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik. Prinsip tersebut dituangkan dalam apa yang disebut POSDCORB yang meliputi *planning, organizing, staffing, reporting, directing, coordinating, reporting, dan budgeting*. Paradigma ini melihat bahwa prinsip prinsip administrasi dapat diterapkan di mana saja (*universal*), sedangkan lokus dari administrasi publik menjadi tidak pernah diungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan prinsip tersebut dapat digunakan di mana saja termasuk dalam organisasi pemerintah. Paradigma ini lebih menekankan fokus daripada lokusnya.

c. Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Pemisahan politik dan administrasi dalam administrasi publik adalah sesuatu yang mustahil dan tidak realistis. Melaksanakan tugas negara, keduanya mempunyai persamaan dalam eksistensi negara, yaitu melayani kepentingan publik.. Paradigma ini meyakini jika administrasi publik merupakan turunan dari ilmu politik. Setiap kegiatannya tidak bebas nilai melainkan selalu dipayungi nilai dan kepentingan tertentu. Lokus dari paradigma ini adalah birokrasi pemerintah, sedangkan fokusnya menjadi kabur

karena di samping ketidak konsistenan prinsip prinsip administrasi, sebaliknya tokoh tokoh yang menggaungkan paradigma ini gagal menemukan fokus dari administrasi publik.

d. Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Prinsip prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya kembali dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisa sistem riset, dan sebagainya terus dikembangkan dan menjadi populer. Dua arah perkembangan terjadi didalam paradigma ini, yaitu :

1. Berorientasi pada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung ilmu disiplin ilmu sosiologis sosial.
2. Berorientasi kepada kebijakan publik.

Semua fokus yang dikembangkan dalam paradigma ini diasumsikan dapat diterapkan bukan hanya di dunia bisnis tetapi juga dalam pemerintahan, oleh karena itu lokus dalam administrasi publik menjadi tidak jelas.

e. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang)

Administrasi publik dalam paradigma ini telah menemukan jati dirinya sebagai sebuah disiplin ilmu. Paradigma ke 5 dalam perkembangannya ini telah menemukan fokus dan lokusnya. Fokus dalam administrasi publik adalah teori organisasi dan teori manajemen, sedangkan lokus nya adalah kebijakan publik dan manajemen publik (urusan publik).

Penelitian ini memusatkan perhatian pada paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik. Penelitian ini melihat fenomena pemerintah sudah berubah orientasi menjadi pelayan masyarakat yang bertugas menjawab setiap urusan dan pilihan publik tanpa terlepas dari fenomena ilmu politik di dalamnya. Paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik telah menemukan fokus dan lokusnya sendiri sebagai jati diri administrasi publik. Fokus dari administrasi publik adalah teori organisasi dan teori manajemen, sedangkan lokus dari administrasi publik adalah manajemen publik dan kebijakan publik.

1.6.4 Kebijakan Publik

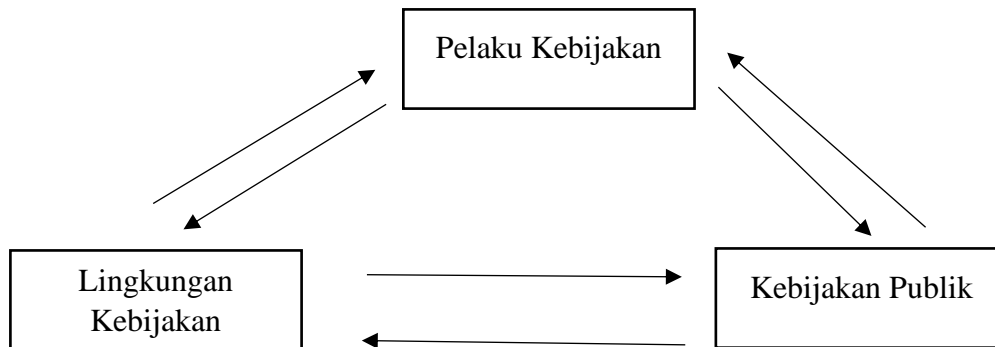
Kebijakan Publik dalam definisi yang mashur dari Dye, yaitu *whatever government choose to do or not to do*. Maknanya, Dye hendak menyatakan bahwa kebijakan publik apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan (dalam Indiahono, 2017). James Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu James Anderson (dalam Indiahono, 2017). Menurut Chandler dan Plano (1988) (dalam Syafiie, 2010) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan permasalahan publik. Sofyan Efendi (dalam Syafiie, 2010) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi, dan kinerja kebijakan serta

program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijaksanaan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan, dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijaksanaan

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip (dalam Winarno, 2002) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Permasalahan ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone (dalam agustino, 2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh badan yang berwenang dalam rangka memecahkan persoalan publik.

Kebijakan publik yang berjalan tidak terlepas dari sistem kebijakan, yang menurut Dunn (dalam Nugroho, 2017) dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.6
Sistem Kebijakan



Sumber : Nugroho,2017

Sistem kebijakan memberikan ruang bahwa kebijakan dipengaruhi oleh aspek lain dan juga berlangsung secara berkelanjutan tanpa henti. Pada sistem kebijakan inilah, diletakan analisis kebijakan publik (Nugroho, 2002:8).

1.6.5 Analisis Kebijakan

Wiliam Dunn (1994) (dalam Nugroho, 2017) menyatakan analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditunjukkan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multi dimensi dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan (Nugroho, 2007:8). Dunn juga berpendapat bahwa analisis kebijakan publik adalah sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode untuk meneliti dan berargumen, untuk memproduksi dan mentransformasi informasi

yang relevan dengan kebijakan yang dapat digunakan dalam tatanan politik untuk mengatasi masalah kebijakan (dalam Nugroho, 2007:37). Walter William (1971) (dalam Nugroho 2007:36) menyatakan bahwa analisis kebijakan adalah sebuah cara penyintesisan informasi, termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan format keputusan kebijakan (yang ditentukan dari sejumlah alternatif pilihan) dan menentukan informasi yang relevan dengan kebijakan. Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan adalah serangkaian proses mengidentifikasi masalah, mengumpulkan fakta-fakta, memberikan alternatif dan merekomendasikan alternatif terbaru dalam menyelesaikan permasalahan kebijakan.

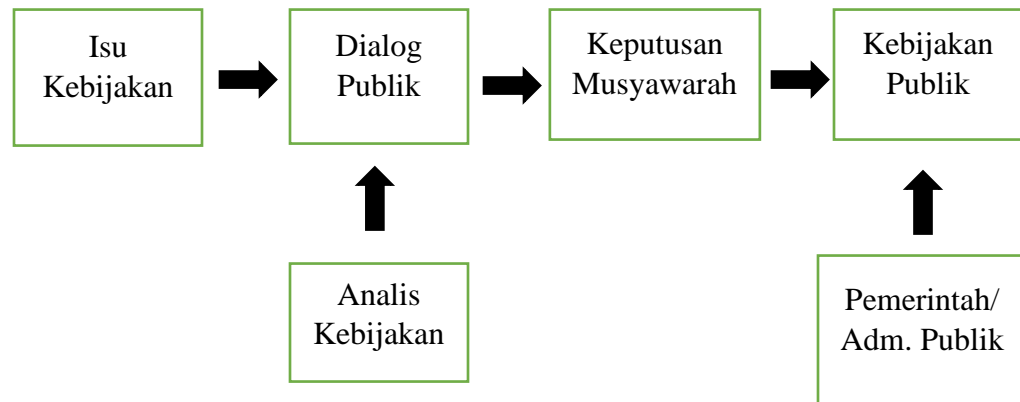
1.6.5.1 Model Analisis Kebijakan

Riant Nugroho, setelah mengkaji beberapa model teori tentang analisis kebijakan publik kemudian ia memunculkan model analisis kebijakan deliberatif. Model ini menurutnya adalah upaya untuk mendudukan publik sebagai pihak yang tidak ditinggalkan dalam proses pengambilan kebijakan (dalam Indiahono, 2017: 52). Semua analisis kebijakan yang dikemukakan para ahli kebijakan publik tidak meletakkan publik sebagai bagian perifer, atau bahkan tidak ada sama sekali dalam proses analisis kebijakan (Nugroho, 2007 :121-122).

Hajjer dan Wagenaar (2003) (dalam Nugroho, 2007:128) mengemukakan bahwa implementasi dari *good governance* dalam analisis kebijakan publik diberi nama *deliberative policy analysis*.

Model analisis kebijakan deliberatif diklaim Riant Nugroho mampu menghindari kebijakan publik yang teknokratik dan mendudukan pemerintah hanya sebagai fasilitator dan legalisator “keingan publik” (Nugroho, 2007). Model analisis kebijakan deliberatif adalah sebagai berikut :

Gambar 1.7
Model Analisis Kebijakan Deliberatif



Sumber : Nugroho, 2007:131

Model ini dinyatakan bukan menjadi hal baru karena telah terjadi dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yaitu dengan adanya musyawarah untuk mufakat. Koreksi terbesar dari analisis kebijakan deliberatif adalah bagaimana analisis kebijakan yang dikenal dan digunakan secara luas pada saat ini dikembangkan menjadi model hibrida yang mengadopsi partisipasi publik (Nugroho, 2007:132).

1.6.5.2 Proses Analisis Kebijakan

Menurut Bardach (dalam Tumanggor, 2018) menyebutkan bahwa proses analisis kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Formulasi Masalah Kebijakan

Formulasi masalah kebijakan merupakan pekerjaan yang sangat prinsipil dan krusial karena jika dalam memfokuskan masalahnya tersebut salah atau tidak benar maka kebijakan publik yang akan diterapkan juga tidak benar. Mengkaji suatu masalah publik diperlukan teori, informasi dan metodologi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

2. Perumusan Tujuan dan Sasaran

Tahapan perumusan tujuan dan sasaran menjadi penting karena akan menentukan prioritas kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan.

3. Mengidentifikasi Parameter Kebijakan

Identifikasi parameter kebijakan merupakan hal penting dalam rangka melakukan tes atau pengujian terhadap hal-hal yang mungkin dilakukan berkaitan dengan sebuah proposal kebijakan. Parameter - parameter kebijakan ini perlu dinilai lebih lanjut khususnya berkaitan dengan indikator-indikator pertanyaan seperti : 1) Apakah alternatif kebijakan yang disampaikan menyediakan pandangan ke depan (*forward looking*) yang lengkap dan memungkinkan ? 2). Apakah alternatif kebijakan yang ditawarkan bisa mengantisipasi berbagai hal yang mungkin di kemudian hari ? 3). Apakah alternatif kebijakan yang disediakan menyediakan implikasi - implikasi (politis, ekonomis, lingkungan dan sebagainya) dari setiap pilihan alternatif? 4). Apakah alternatif kebijakan menyediakan

strategi yang jelas dan realistis terhadap sebuah proposal kebijakan ? 5).

Apakah alternatif kebijakan tersebut mudah dilaksanakan ?

4. Mencari Alternatif-Alternatif

Tahapan ini membutuhkan penelitian yang mendalam. Inti dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi atau masalah yang relevan serta mengidentifikasi berbagai respon (tanggapan) yang mungkin dilakukan.

5. Memutuskan Alternatif -Alternatif Pilihan

Memutuskan alternatif-alternatif pilihan merupakan proses akhir yang harus dilakukan setelah tahapan mencari alternatif dilakukan. Produk dari analisis kebijakan adalah rekomendasi kebijakan yang tentunya akan lebih baik jika lebih dari satu pilihan, agar pihak pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan pilihan mana yang akan diputuskan. Analisis secara lengkap dari masing-masing alternatif-alternatif tentunya sangat diharapkan.

1.6.5.3 Parameter Kebijakan

Proses analisis kebijakan memuat kriteria atau parameter kebijakan. Patton dan Sawicky (dalam Tumanggor, 2018) mengajukan empat kriteria atau parameter dalam menilai alternatif kebijakan, yaitu :

1. Kelayakan Teknis (*Technical feasibility*)

Apakah alternatif yang dipilih dapat mengatasi pokok persoalan yang muncul. Ini mencakup dua sub – kriteria, yakni efektivitas (*effectiveness*) dan kecukupan (*adequacy*). Efektivitas menyangkut, apakah alternatif yang dipilih dapat mencapai tujuan yang diinginkan, sedangkan kecukupan menyangkut seberapa jauh alternatif yang dipilih mampu memecahkan persoalan.

2. Kemungkinan Ekonomi dan Finansial (*Economic and Financial Possibility*)

Kriteria ini menyangkut : sub-kriteria *economic efficiency, profitability dan cost effectiveness*. Efisiensi ekonomi mempersoalkan apakah dengan menggunakan sumber yang ada dapat diperoleh manfaat yang optimal. Profitability mempersoalkan perbandingan antara input dan output kebijakan, sedangkan efisiensi biaya mempersoalkan apakah tujuan dapat dicapai dengan biaya yang minimal.

3. Kelayakan Politik (*Political Viability*)

Kriteria ini mencakup subkriteria : tingkat penerimaan, kepantasan, daya tanggap, legal dan keadilan. Tingkat penerimaan adalah apakah alternatif kebijakan yang bersangkutan dapat diterima oleh para aktor politik dan masyarakat. Kepantasan mempersoalkan apakah kebijakan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Daya tanggap menanyakan apakah kebijakan yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Legal adalah apakah kebijakan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Aspek keadilan menanyakan apakah kebijakan tersebut dapat mempromosikan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

4. Kelayakan Administratif (*Administrative Operability*)

Kriteria ini mencakup otoritas, komitmen institusi, kapasitas dan dukungan organisasi. Otoritas mempersoalkan apakah organisasi pelaksana kebijakan cukup memiliki otoritas. Komitmen institusi menyangkut komitmen dari para administrator dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Kapasitas berkenaan dengan kemampuan aparatur baik kemampuan konseptual maupun keterampilan. Dukungan organisasi adalah ada tidaknya dukungan dari organisasi pelaksana.

Penentuan dalam rekomendasi kebijakan merupakan serangkaian aktivitas untuk menentukan informasi dan kebijakan dengan membawa dampak perubahan yang positif di masa yang akan datang (Dunn, 2003).

Penentuan alternatif terbaik diantara alternatif-alternatif yang ada, menurut Dunn (2003) adalah sebagai berikut :

1. Model Pilihan yang Kompleks

Alternatif-alternatif kebijakan yang ada bisa lebih dari dua dan tiga alternatif. Penentuan dengan menggunakan model pilihan yang kompleks dilakukan dengan menentukan banyaknya aktor kebijakan yang terlibat, biaya yang dihasilkan, dan hasil yang diperoleh. Secara sederhana, model ini menilai alternatif dari sisi pendapatan dan perolehan yang dibandingkan antar satu alternatif dengan alternatif lainnya. Penilaian didasarkan pada pemberian bobot dan skor terhadap alternatif kebijakan yang ada.

2. Model Analisis Biaya-Manfaat

Analisis biaya manfaat adalah suatu pendekatan rekomendasi kebijakan yang memungkinkan peneliti membandingkan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dalam bentuk uang dan total keuntungan dalam bentuk uang. Secara sederhana, analisis model ini melakukan lebih banyak dengan pendekatan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan teori Bridman dan Davis (dalam Tumanggor, 2018) dalam melakukan proses analisis kebijakan, teori Bardach (dalam Yuningsih, 2015) untuk mengukur parameter alternatif kebijakan yang hendak dipilih. Penilaian kebijakan dilakukan dengan memberikan bobot dan skor penilaian berdasarkan model pilihan yang kompleks (Dunn, 2003).

1.6.6 Pengelolaan Sampah

1.6.6.1 Pengertian Sampah

Menurut definisi World Health Organization (WHO) (dalam Hertati, 2017), sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Menurut Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 (dalam Utomo & Hilal, 2017) sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik dan anorganik, bersifat dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Menurut Notoatmodjo (2003) (dalam Hertati, 2017) menyebutkan bahwa sampah adalah bahan atau benda padat yang sudah tidak terpakai lagi oleh manusia atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang. Soemirat (1994) (dalam Hertati, 2017) berpendapat bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang sudah dibuang atau tidak digunakan lagi dan bersifat padat serta dapat mencemari lingkungan karena sifatnya yang membusuk.

1.6.6.2 Sumber Sampah

Notoatmodjo (2003) (dalam Hertati, 2017) menyebutkan bahwa sumber sumber sampah adalah sebagai berikut :

a. Sampah yang berasal dari pemukiman (*domestic wastes*)

Sampah ini terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga yang sudah dipakai dan dibuang, seperti sisa-sisa makanan baik yang sudah dimasak atau belum, bekas pembungkus baik kertas, plastik, daun, dan sebagainya, pakaian-pakaian bekas, bahan-bahan bacaan, perabot rumah tangga, daun-daunan dari kebun atau taman

b. Sampah yang berasal dari tempat- tempat umum

Sampah ini berasal dari tempat-tempat umum, seperti pasar, tempat-tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta api, dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas, plastik, botol, daun, dan sebagainya.

c. Sampah yang berasal dari perkantoran

Sampah ini dari perkantoran baik perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan, dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas-kertas, plastik, karbon, klip dan sebagainya. Umumnya sampah ini bersifat anorganik, dan mudah terbakar (*rubbish*).

d. Sampah yang berasal dari jalan raya

Sampah ini berasal dari pembersihan jalan, yang umumnya terdiri dari: kertas kertas, kardus-kardus, debu, batuan, pasir, sobekan ban, onderdil- onderdil kendaraan yang jatuh, daun-daunan, plastik, dan sebagainya.

e. Sampah yang berasal dari industri (*industrial wastes*)

Sampah ini berasal dari kawasan industri, termasuk sampah yang berasal dari pembangunan industri, dan segala sampah yang berasal dari proses produksi, misalnya : sampah pengepakan barang, logam, plastik, kayu, potongan tekstil, kaleng, dan sebagainya.

f. Sampah yang berasal dari pertanian/perkebunan.

Sampah ini sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian misalnya: jerami, sisa sayur-mayur, batang padi, batang jagung, ranting kayu yang patah, dan sebagainya.

g. Sampah yang berasal dari pertambangan

Sampah ini berasal dari daerah pertambangan, dan jenisnya tergantung dari jenis usaha pertambangan itu sendiri, misalnya: batu-batuan, tanah/cadas, pasir, sisa-sisa pembakaran (arang), dan sebagainya.

h. Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan

Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan ini, berupa : kotoran-kotoran ternak, sisa-sisa makanan, bangkai binatang, dan sebagainya.

1.6.6.3 Jenis Sampah

Menurut Mukono (2006) (dalam Hertati, 2017) jenis sampah adalah sebagai berikut :

- a) Sampah berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya
 1. Sampah anorganik, adalah sampah yang umumnya tidak dapat membusuk, misalnya : logam/besi, pecahan gelas, plastik dan sebagainya.
 2. Sampah organik, adalah sampah yang pada umumnya dapat membusuk, misalnya : sisa-sisa makanan, daun-daunan, buah-buahan dan sebagainya.
- b) Sampah berdasarkan dapat dan tidaknya terbakar
 1. Sampah yang mudah terbakar, misalnya:kertas, karet,kayu, plastik, kain bekas dan sebagainya.
 2. Sampah yang tidak dapat terbakar, misalnya: kaleng-kaleng bekas, besi/logam bekas, pecahan gelas, kaca, dan sebagainya.
- c) Sampah berdasarkan karakteristiknya:
 1. Abu(Ashes), merupakan sisa pembakaran dari bahan yang mudah terbakar, baik di rumah, di kantor maupun industri.
 2. Sampah Jalanan (*Street Sweeping*), berasal dari pembersihan jalan dan trotoar, terdiri dari kertas-kertas, kotoran dan daun-daunan.
 3. Bangkai Binatang (*Dead Animal*), yaitu bangkai binatang yang mati karena bencana alam, penyakit atau kecelakaan.
 4. Sampah pemukiman (*Household refuse*), yaitu sampah campuran yang berasal dari daerah perumahan.

5. Bangkai Kendaraan (*Abandoned vehicles*), yang termasuk jenis sampah ini adalah bangkai mobil, truk, kereta api, satelit, kapal laut dan alat transportasi lainnya.
6. Sampah industry, terdiri dari sampah padat yang berasal dari industri pengolahan hasil bumi, tumbuh- tumbuhan dan industri lainnya.
7. Sampah hasil penghancuran gedung/bangunan (*Demolotion waste*), Yaitu sampah yang berasal dari perombakan gedung/bangunan.
8. Sampah dari daerah pembangunan, yaitu sampah yang berasal dari sisa pembangunan gedung, perbaikan dan pembaharuan gedung. Sampah dari daerah pembangunan ini mengandung tanah batu-batuan, potongan kayu, dan lain sebagainya.
9. Sampah Khusus, yaitu sampah yang memerlukan penanganan khusus dalam pengelolaannya, misalnya kaleng cat, film bekas, zat radioaktif dan zat yang toksis.

1.6.6.4 Pengelolaan Sampah

Menurut Reksosoebroto (dalam Hertati, 2017) pengelolaan sampah sangat penting untuk mencapai kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, dengan demikian sampah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Techobanoglous (2007) (dalam Hertati, 2017) mengatakan pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan (sementara), pengumpulan, pemindahan dan

pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip- prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik (*engineering*), perlindungan alam (*conservation*), keindahan dan pertimbangan lingkungan lainnya dan juga mempertimbangkan sikap masyarakat. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir (Kartikawan,2000).

Studi pengelolaan sampah sudah banyak dilakukan ilmuwan diberbagai negara dengan menggunakan istilah yang berbeda, seperti *waste management* dan *solid waste management*. Pendekatan umum yang digunakan dalam pengelolaan sampah adalah konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang kemudian diperbarui menjadi pendekatan 4R dengan menambah komponen “*recover*” dan kemudian diperbarui lagi menjadi 5R dengan menambahkan unsur 3R dengan ‘*respect* dan *rethink*’ (Pariatamby (2014) (dalam Wahyudi, 2016).

1.7 Operasionalisasi Konsep

1. Proses Analisis Kebijakan

Proses analisis kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas merupakan serangkaian kegiatan mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, mengelola alternatif kebijakan, memilih, dan merekomendasikan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Banyumas dengan proses :

a. Formulasi masalah kebijakan

1. Mengidentifikasi tujuan-tujuan dalam pengelolaan sampah
2. Menentukan masalah-masalah dalam pengelolaan sampah.

b. Merumuskan tujuan dan sasaran

1. Menentukan tujuan yang hendak dicapai
2. Menentukan sasaran yang akan dicapai

c. Mengidentifikasi parameter kebijakan

Menentukan parameter yang menjadi ukuran alternatif-alternatif kebijakan, dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan mudah dilaksanakan?
2. Apakah kebijakan relevan dilaksanakan saat ini?
3. Apakah alternatif kebijakan yang disediakan menyediakan implikasi - implikasi (politis, ekonomis, lingkungan dan sebagainya) dari setiap pilihan alternatif?

d. Mencari alternatif alternatif kebijakan

Menentukan alternatif-alternatif kebijakan yang sesuai dengan parameter kebijakan

e. Memilih alternatif

1. Memilih alternatif dengan nilai tertinggi diantara alternatif-alternatif lain

2. Merekomendasikan kebijakan pengelolaan sampah dengan alternatif terpilih

2. Menilai Alternatif Kebijakan

Proses yang dilakukan untuk menilai setiap alternatif-alternatif kebijakan, dengan gejala :

a. Kelayakan Teknis

Penilaian alternatif kebijakan berdasarkan pada kemampuan mencapai tujuan kebijakan dan persoalan penyelesaian masalah, dengan gejala :

1. Efektivitas : Kemampuan kebijakan dalam mencapai tujuan

2. Kecukupan : Seberapa jauh alternatif kebijakan menyelesaikan persoalan

b. Kemungkinan Ekonomi dan Finansial

Penilaian alternatif kebijakan berdasarkan kemampuan mengukur input dan output kebijakan dengan memperhatikan efisiensi biaya dan manfaat yang besar dalam penyelesaian permasalahan sampah, dengan sub gejala :

1. Efisiensi Ekonomi : Penggunaan sumber daya untuk memperoleh hasil yang optimal

2. Efisiensi Biaya : Pencapaian tujuan dengan biaya yang minimal

3. *Profitability* : Perbandingan antara input dan output kebijakan

c. Kelayakan Politik

Penilaian alternatif kebijakan dengan melihat tingkat penerimaan aktor politik dan *stakeholder's* pengelolaan sampah dengan sub gejala :

1. Tingkat Penerimaan : Kebijakan dapat diterima aktor politik dan masyarakat.
2. Kepantasan : Kebijakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.
3. Legal : Kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada
4. Keadilan : Kebijakan mempromosikan dan melakukan pemerataan keadilan dimasyarakat.
5. Daya Tanggap : Kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

d. Kelayakan Administratif

Penilaian alternatif kebijakan dengan melihat kemudahan administrasi maupun pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, dengan sub gejala :

1. Otoritas : Organisasi pelaksana kebijakan memiliki kekuatan otoritas yang kuat
2. Dukungan Organisasi : Dukungan organisasi terhadap kebijakan yang diambil
3. Komitmen Institusi : Komitmen aparatur dari tingkat atas sampai bawah terhadap kepatuhan pada kebijakan.

Tabel 1.5
Fenomena Penelitian

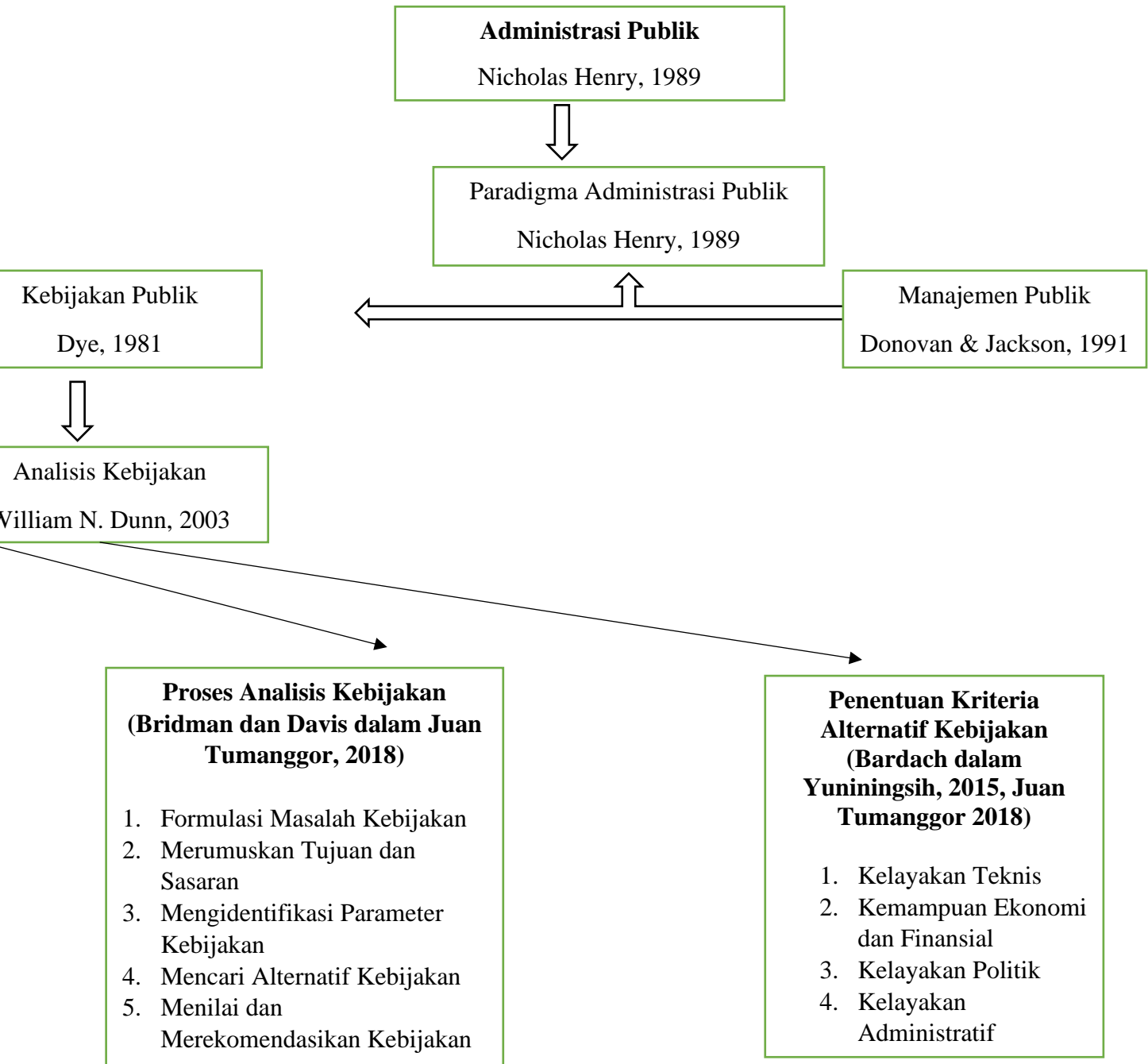
No	Fenomena	Gejala Yang diamati	Sub Gejala	Pertanyaan Penelitian
1	Proses Analisis Kebijakan	Formulasi masalah kebijakan, menentukan permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi tujuan pengelolaan sampah 2. Menentukan masalah-masalah dalam pengelolaan sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja tujuan-tujuan dalam pengelolaan sampah? 2. Bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Banyumas?
		Merumuskan tujuan dan sasaran, yaitu proses mengerucutkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kebijakan pengelolaan sampah	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menentukan tujuan kebijakan 4. Menentukan sasaran yang akan dicapai 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Apa yang menjadi tujuan dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas? 4. Apa dan siapa saja sasaran kebijakan yang akan menjadi target implementasi?
		Mengidentifikasi parameter kebijakan, Menentukan parameter yang menjadi ukuran alternatif-alternatif kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 5. Parameter kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Apakah kebijakan mudah dilaksanakan? 6. Apakah alternatif kebijakan yang disediakan menyediakan implikasi - implikasi (politis, ekonomis, lingkungan dan sebagainya) dari setiap pilihan alternatif?

				7. Apakah kebijakan yang diambil relevan dilaksanakan saat ini?
		Mencari alternatif alternatif kebijakan, menentukan alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai dengan parameter yang ditetapkan	6. Menentukan alternatif-alternatif	8. Apakah alternatif kebijakan yang diajukan telah memenuhi tujuan dan sasaran kebijakan, serta parameter yang ditetapkan?
		Memilih alternatif, menentukan alternatif kebijakan dengan nilai tertinggi sebagai rekomendasi kebijakan.	7. Memilih alternatif dengan nilai tertinggi diantara alternatif-alternatif lain 8. Merekomendasikan kebijakan pengelolaan sampah dengan alternatif terpilih	9. Bagaimana dampak kebijakan yang dipilih untuk keberlangsungan di masa depan?
2	Menilai Alternatif	Kelayakan Teknis, mengukur seberapa jauh alternatif kebijakan mencapai tujuan dan menyelesaikan persoalan.	9. Efektifitas : pencapaian tujuan 10. Kecukupan : penyelesaian persoalan	10. Apakah alternatif yang diajukan dapat menjawab tujuan yang ditetapkan dalam mengatasi persoalan sampah? 11. Seberapa jauh alternatif yang diajukan mampu menjawab persoalan?

		<p>Kemampuan Ekonomi dan Finansial, mengukur input dan output kebijakan dengan memperhatikan efisiensi biaya dan manfaat yang besar.</p>	<p>11. Efisiensi Ekonomi : Penggunaan sumber daya untuk memperoleh hasil yang optimal</p> <p>12. Efisiensi Biaya : Pencapaian tujuan dengan biaya yang minimal</p> <p>12. <i>Profitability</i> : Perbandingan antara input dan output kebijakan</p>	<p>13. Apakah penggunaan sumber daya yang ada dapat memperoleh hasil yang optimal?</p> <p>14. Bagaimana perbandingan antara input dan output yang nantinya dihasilkan?</p> <p>15. Apakah alternatif yang diajukan dapat menjawab tujuan dengan biaya yang minimal?</p>
		<p>Kelayakan Politik, Penilaian alternatif kebijakan dengan melihat tingkat penerimaan aktor politik dan <i>stakeholder's</i> pengelolaan sampah</p>	<p>25. Tingkat Penerimaan : Kebijakan dapat diterima aktor politik dan masyarakat.</p> <p>26. Kepantasan : Kebijakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat.</p> <p>27. Legal : Kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada</p> <p>28. Keadilan : Kebijakan mempromosikan dan melakukan pemerataan keadilan dimasyarakat.</p>	<p>16. Apakah alternatif yang diajukan dapat diterima aktor politik dan masyarakat?</p> <p>17. Apakah kebijakan yang diajukan tidak bertentangan dengan nilai yang ada dimasyarakat?</p> <p>18. Apakah alternatif yang diajukan memenuhi kebutuhan masyarakat?</p> <p>19. Apakah alternatif yang diajukan tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada?</p>

			29. Daya Tanggap : Kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	
		Kelayakan Administratif, Penilaian alternatif kebijakan dengan melihat kemudahan administrasi maupun pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah	30. Otoritas : Organisasi pelaksana kebijakan memiliki kekuatan otoritas yang kuat. 31. Dukungan Organisasi : Dukungan organisasi terhadap kebijakan yang diambil. 20. Komitmen Institusi : Komitmen aparatur dari tingkat atas sampai bawah terhadap kepatuhan pada kebijakan.	21. Apakah organisasi pelaksana memiliki otoritas untuk melaksanakan? 22. Apakah intitusi tingkat atas sampai bawah mendukung dan komitmen melaksanakan alterntif yang diajukan? 23. Apakah aparatur memiliki kemampuan melaksanakan? 24. Apakah dukungan organisasi kuat dalam menjalankan alternatif yang diajukan?

Gambar 1.8
Kerangka Pikir Teoritis



Sumber : (Dunn, 2003), (Yuniningsih, 2015), (Paulus Ifon Jantua Tumanggor, 2018)

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu

sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengatasi suatu permasalahan (Sugiyono, 2015: 6).

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas” ini menggunakan perspektif penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2015 : 15). Metode deskriptif menurut Nazir (2013:43), menjelaskan “metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.”

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas dengan lokus di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Banyumas, dan mengambil sampel di TPST Kedung Randu Purwokerto. Dinas lingkungan hidup dipilih sebagai operator pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Purwokerto merupakan salah satu pusat kota di Kabupaten Banyumas sehingga data diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Banyumas tepatnya di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Kedungrandu.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ditentukan berdasarkan teknik *snowball*. Teknik *snowball* adalah teknik pengambilan sampling sumber data dengan menentukan sedikit kemudian lama-lama akan semakin besar (Sugiyono, 2015 : 300). Teknik ini dilakukan dengan menentukan sampel awal sebagai *key informan*, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, kemudian penentuan subjek lanjutan adalah Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Seksi Persampahan

Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup, Kepala UPKP Wikayah Ajibarang, dan Pengelola TPST Kedungrandu.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini berupa teks, kata-kata tertulis, frasa atau simbol yang menggambarkan dan merepresentasikan kondisi penelitian dan permasalahan di lapangan.

1. Kata dan Tindakan

Kata-kata atau ucapan yang disampaikan oleh informan merupakan jenis data yang utama dan paling dominan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengungkapkan dan menuliskan informasi berupa kata-kata dalam bentuk teks, narasi, foto, rekaman, atau video, dan lain sebagainya menggunakan media telekomunikasi dan jaringan untuk mendukung penelitian.

2. Sumber Tertulis

Sumber tertulis digunakan untuk memperkaya informasi dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi, seperti dokumen, majalah, buku, surat kabar, jurnal, peraturan, dan lain sebagainya.

3. Foto

Dokumentasi kegiatan merupakan sebuah keharusan ditengah perkembangan teknologi informasi. Foto-foto yang diambil digunakan untuk menunjang dan mendukung penelitian, juga sebagai bukti pelaksanaan penelitian.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas” menggunakan 2 sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2006:137), “data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data yang diperoleh merupakan data yang diolah sendiri atau diperoleh langsung dari objeknya. Data primer didapat dari wawancara maupun pengambilan data pada subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2006:137), merupakan “sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data sekunder didapat melalui dokumen dokumen, buku, jurnal, artikel.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Merupakan pengambilan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan untuk menemukan fakta fakta yang terjadi. Observasi dilakukan pada tempat-tempat yang menjadi subyek penelitian di wilayah Kabupaten Banyumas. Keterbatasan kondisi akibat masa pandemi, observasi dilakukan secara hati-hati dan dengan protokol kesehatan yang ketat.

2. Wawancara

Esteborg (2002) (dalam Sugiyono, 2015 : 317) mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pandemi covid-19 berimplikasi pada proses wawancara dengan memperhatikan protokol kesehatan yang

ketat, dengan menjaga jarak dan tidak melakukan pengumpulan narasumber secara langsung, melainkan dilakukan secara bertahap satu persatu.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui pendokumentasian kegiatan maupun beberapa lokasi yang dianggap perlu untuk menambah validitas data.

4. Studi Kepustakaan

Melakukan pengumpulan data melalui berbagai macam sumber literatur baik jurnal, artikel, buku, dokumen, serta berbagai macam informasi yang dilakukan melalui pendalaman materi.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2015: 335). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan model Milles dan Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2015 :337) yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, dan memfokuskan pada data yang penting. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, maupun teks yang bersifat naratif. Proses penarikan kesimpulan awal bersifat sementara dan akan berubah ketika tidak ditemukan data pendukung, sebaliknya kesimpulan dianggap valid bila disertai dengan bukti dan konsistensi data.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Wersma : 1986) (dalam Sugiyono, 2015 : 372). Menurut Sugiyono (2015 : 373), terdapat tiga jenis macam teknik triangulasi. Adapun ketiga jenis tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan pengujian dengan cara pengecekan data yang diperoleh selama penelitian oleh beberapa sumber;
2. Triangulasi teknik, merupakan teknik triangulasi dengan melakukan pengujian dengan cara pengecekan data yang sama namun dengan menggunakan alat yang berbeda;
3. Triangulasi waktu, merupakan teknik triangulasi yang digunakan dengan mengumpulkan dan melakukan pengecekan dalam waktu atau situasi yang berbeda untuk melihat hasil yang ada.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu peneliti tidak hanya mencari sumber informasi dengan mewawancarai satu informan saja, melainkan melakukan wawancara dengan orang yang berbeda tetapi masih sesuai dengan kriteria *informan* guna memperoleh informasi yang benar sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.